PPTRA PERKUAT FUNGSI PEMBINAAN MELALUI PENERBITAN PERATURAN BADAN

FGD Penyusunan Peraturan Kepala Badan

Di bidang pembinaan atlas, PPTRA melalui Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial (APS) sedang mengupayakan terbitnya pedoman teknis terkait atlas taktual. Pedoman yang tengah disusun tersebut dikhususkan pada aspek generalisasi peta untuk atlas yang didedikasikan untuk para penyandang disabilitas netra ini. Pedoman tersebut direncanakan akan dikemas dalam bentuk Peraturan kepala Badan Informasi Geospasial.

Sepanjang tahun 2017, tim penyusun berfokus merumuskan hal-hal substantif terkait pedoman tersebut. Selain terdiri dari tim teknis Bidang APS, tim penyusun juga terdiri dari beberapa praktisi dari Lembaga Dria Manunggal. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di Yogyakarta ini memang sudah cukup banyak berkecimpung di bidang IG bagi tunanetra dan menjadi mitra BIG dalam penyusuan atlas taktual.

Hingga saat ini, tim penyusun telah berhasil merumuskan substansi yang harus dituangkan dalam pedoman teknis generalisasi peta. Hal-hal substantif tersebut berupa penjabaran contoh-contoh kasus dari setiap jenis generalisasi peta. Jenis generalisasi peta pada atlas taktual terdiri dari penyederhanaan atau penghalusan, pembesaran, penggeseran, penggabungan, pemilihan, dan penghilangan. Jenis generalisasi peta bagi penyandang disabilitas netra memiliki keunikan karena harus memperhatikan tingkat keterbacaan oleh indera raba yang kepekaannya jauh lebih rendah daripada indera penglihatan.

Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2017, tim penyusun mendiskusikan ilustrasi gambar dari setiap contoh generalisasi peta. FGD yang dipimpin oleh Kepala Bidang APS, Dra. Niendyawati, M.Sc. ini berlangsung cukup dinamis. Masukan-masukan kritis terhadap draf yang dibahas cukup banyak mengemuka sepanjang jalannya diskusi. Perdebatan-perdebatan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak mudah menyamakan persepsi tim penyusun yang hampir seluruhnya adalah orang awas dengan persepsi tunanetra. Dalam FGD tersebut, tunanetra diwakili oleh Drs. Setia Adi Purwanta, M. Pd., yang juga merupakan Lembaga Direktur Dria Manunggal.

Tim penyusun menargetkan pada tahun 2017 ini perumusan seluruh substansi permasalahan generalisasi peta pada atlas taktual dapat diselesaikan. Selanjutnya, hasil rumusan tersebut akan diserahkan kepada Bagian Hukum BIG untuk diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. [**Randhi Atiqi, 2017**]

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

Rapat Pleno Penyerahan Surat Rekomendasi Peta RTRW Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rapat Pleno Penyerahan Surat Rekomendasi Peta RTRW Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara

Status Asistensi Peta RTR Untuk RTRW Provinsi

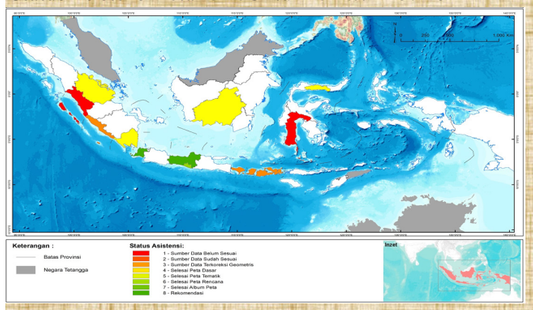

Status Asistensi Peta RTR Untuk RTRW Kota / Kabupaten

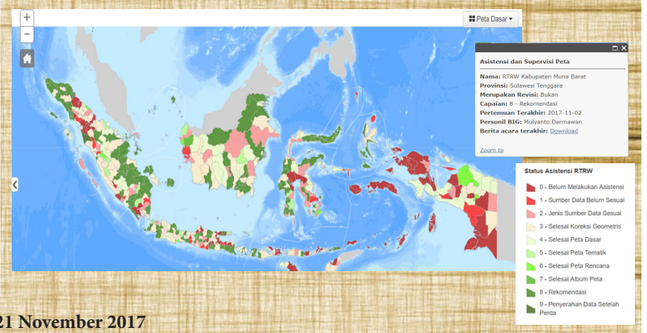

Data Asistensi dan Supervisi Peta Tata Ruang Periode Januari - 21 November 2017

Jenis Supervisi		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Jml
RTR Umum	RTRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RTRWP	1	1	1	2	4	2	1	6	3	5	2	28
	RTRWK	8	11	16	22	22	17	23	36	30	53	36	274
RTR Rinci	KSN	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	7
	KSP	2	6	3	3	8	3	3	2	5	6	6	47
	KSK	0	0	0	1	3	0	0	2	0	3	0	9
	RDTR	54	58	88	72	60	42	53	83	109	140	83	842
Total		65	79	108	100	99	65	80	129	147	207	128	1207

Kompilator Data: Marhensa Aditya Hadi, 2017

Status Asistensi Peta RDTR

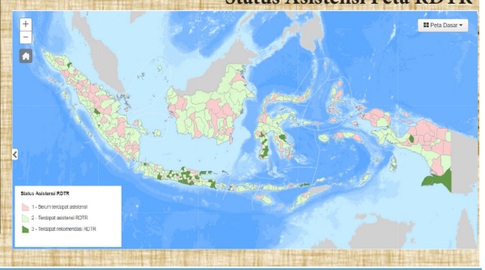

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.ptra@gmail.com
Twitter: @ptra_big

Edisi IX | November 2017

Tata Ruang & Atlas NEWSLETTER

Media Informasi Pemetaan Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya dan Atlas

CATATAN BERANDA

Catatan beranda kali ini mengangkat penyajian informasi tata ruang dan atlas yang baik dan benar. Kesalahan penarikan garis batas atau penetapan kawasan dan zonasi dalam tata ruang yang tidak sesuai dengan data dasar, norma klasifikasi atau tidak memperhatikan kepentingan sektoral berdampak serius di lapangan. Konflik pemanfaatan lahan tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan politik. Konflik umumnya berawal dari ketidakakuratan informasi geospasial yang digunakan.

Untuk itulah amanah PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang kami jalankan melalui serangkaian kegiatan asistensi dan bantuan teknis. Kami ingin tata ruang menjadi panglima pembangunan, sehingga peta rencana tata ruang yang akurat, *update,* dan dapat dipertanggung jawabkan dapat dicapai. Strategi yang kami lakukan menimbulkan berbagai pertanyaan internal terkait tupoksi ataupun keinginan eksternal terkait asumsi bahwa keakuratan peta tata ruang hanya perlu peta dasar. Perlu diketahui bahwa kegiatan asistensi BIG yang melahirkan rekomendasi untuk status tata ruang itu benar dan sesuai amanah Peraturan Pemerintah. Di sisi lain, rekomendasi BIG bukan satu-satunya dokumen rekomendasi yang menjadi kendala dalam percepatan ruang. Rekomendasi BIG adalah salah satu dari 14 dokumen yang diperlukan agar raperda tata ruang mendapat persetujuan Menteri Agraria Tata Ruang/BPN. Penyiapan 14 dokumen tersebut bukanlah perkara mudah dan perlu waktu seperti rekomendasi kawasan hutan atau ijin KLHS. Inilah konsekuensi yang kita ambil atas peta tata ruang yang benar.

Kami di PPTRA senantiasa berinisiatif dalam mendukung proses percepatan asistensi. Program percepatan asistensi peta tata ruang di daerah yang kami canangkan baru-baru ini mulai menunjukkan hasil. Dalam waktu satu bulan, kami dapat melakukan bantuan asistensi langsung kepada seluruh kabupaten di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Papua Barat, dan Jawa Timur. Dapat dibayangkan bila 37 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, atau 27 kabupaten di Jawa Barat mengajukan permohonan asistensi peta tata ruang, maka kami harus mengalokasikan sekitar 30 hari untuk melakukan asistensi. Alhamdulillah dengan program asistensi intensif di daerah, waktu asistensi dapat diefisienkan menjadi 2 hari dan seluruh kabupaten tersebut terlayani.

Selain disibukkan dengan *review* akhir proses asistensi tata ruang, kami berharap sampai akhir tahun 2017, seluruh 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah terlayani program asistensi. Potret seluruh kegiatan di bulan November pada Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) menunjukkan grafik peningkatan luar biasa. Bahkan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran telah disusun harian sampai akhir tahun agar tercapai output kegiatan sesuai rencana. Salah satu beban berat di bulan November adalah memeriksa hasil pekerjaan penyedia jasa yang umumnya telah memasuki babak akhir. Kami temukan beberapa penyedia jasa cukup baik dalam menyusun laporan akhir, ada pula beberapa yang terkesan sekadar menyajikan banyak data lapangan namun miskin menyajikan satu temuan penting dari kegiatan tersebut, termasuk tidak menghasilkan peta yang baik. Untuk itulah kami semua di PPTRA akan terus belajar dan bekerja sungguh-sungguh agar produk kami bermanfaat bagi banyak pihak. Mohon doa dan dukungannya. [**Mulyanto Darmawan, 2017**]

ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Sudah sering kita mendengar tentang istilah SDG's *(Sustainable Development Goals)*. Apa makna SDG's itu?. SDG's merupakan agenda pembangunan dunia untuk kesejahteraan manusia dan kelangsungan kehidupan berkelanjutan di planet bumi yang ditetapkan oleh PBB pada September 2015 menggantikan kerangka pembangunan sebelumnya yaitu MDG's *(Millenium Development Goals)* yang sudah dilaksanakan dari tahun 2000. Kerangka pembangunan global ini memiliki rentang pelaksanaan 15 tahun sehingga SDG's ini akan berakhir pada 2030 nanti.

Indonesia menjadi bagian dari implementasi platform pembangunan global ini yang secara langsung juga sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah dalam Program Nawacita. Selain itu, pemerintah juga memastikan dengan menyusun kerangka pelaksanaan SDG's dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara garis besar kerangka SDG's terdiri atas 4 pilar yaitu:

1) Pembangunan Sosial;

2) Pembangunan Ekonomi;

3) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;

4) Pembangunan Lingkungan.

Selain itu, SDG's terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 475 indikator seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional (TPB) yang disiapkan oleh Bappenas pada tahun 2017.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030

Tujuan pembangunan untuk mencapai Nawacita maupun SDG's telah menghasilkan paradigma pembangunan baru yang dikenal dengan HITS (Holistik-Integratif, Tematik, dan Spasial). Unsur spasial menjadi variabel penting dalam proses perencanaan, pelaksaanaan, dan pengawasan pembangunan. Output dan dampak pembangunan juga akan lebih terukur dengan adanya informasi spasial sebagai salah satu basis dalam merepresentasikan seluruh program pembangunan.

Dalam upaya mencapai tujuan SDG's ke depan, diperlukan kerjasama multi pihak dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Informasi spasial akan menjadi instrumen penting untuk mengawal implementasi seluruh program pembangunan. Menjadi tantangan besar bagi BIG untuk segera menyiapkan skema tata kelola informasi geospasial nasional, peningkatan pembinaan kepada walidata, penerapan kepatuhan standar pelaksanaan penyelenggaraan, sampai dengan penerapan mekanisme berbagi pakai IG. [**Habib Subagio, 2017**]

REDAKSI:

| **Penanggung Jawab :** Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi:** Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| **Editor:** Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Ellen Suryanegara, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rakyan Paksi, Rochmad Budi S., I Made Dipta S. | **Desain Tata Letak:** Ika Rosalika |

POTRET KEGIATAN

FGD PELIBATAN PPIDS DALAM PERCEPATAN PETA RENCANA TATA RUANG

FGD Bersama PPIDS dalam Percepatan Peta Rencana Tata Ruang

Dalam rangka proses percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang, Badan Informasi Geospasial melakukan sebuah terobosan dengan melibatkan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) untuk membantu proses asistensi dan supervisi. Hingga saat ini, telah ada dua PPIDS yang selesai melakukan proses *Training of Trainer* (ToT) yaitu PPIDS Universitas Gadjah Mada dan PPIDS Institut Teknologi Bandung. Setelah proses ToT tersebut diharapkan PPIDS dapat langsung berkontribusi dalam proses asistensi dan supervisi.

Pada hari rabu tanggal 22 November 2017, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas yang didukung oleh Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial melaksanakan FGD PPIDS seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah awal pelibatannya dalam proses percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kementerian ATR/BPN, Ir. Sufrijadi, MA, yang menjelaskan terkait selayang pandang proses persub, status dan data perda RTRW-RDTR, dan keterkaitannya dengan proses pemetaan di BIG. Pertemuan ini disambut antusias oleh masing-masing PPIDS. Beberapa PPIDS menyampaikan paparan pengalaman pelibatan PPIDS dalam proses asistensi supervisi yang disampaikan oleh Dr. Albertus Deliar ST., MT mewakili PPIDS ITB serta Dr. Diyono, ST., MT. mewakili PPIDS UGM. Selain itu, terdapat beberapa tanggapan dari beberapa wakil PPIDS di luar Pulau Jawa seperti PPIDS Universitas Hasanuddin, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana, dan lain-lain.

Kegiatan ini ditutup oleh Dr. Suprajaka, MT. Beliau berharap kegiatan lanjutan ToT di PPIDS seluruh Indonesia dapat terlaksana untuk percepatan penyelesaian proses peta rencana tata ruang.

[Chintia Dewi, 2017]

PEMKAB TEMANGGUNG DUKUNG DISABILITAS NETRA CERDAS SPASIAL

Rabu-Kamis, 23-24 November 2017, di tengah kesejukan udara Kota Temanggung berlangsung kegiatan pembinaan informasi geospasial tematik khususnya tema industri untuk disabilitas netra. Kota berhawa dingin di timur Gunung Sindoro-Sumbing ini menjadi tempat penutup rangkaian aktivitas pembinaan disabilitas netra tahun 2017. Acara berlangsung menarik dan interaktif, serta diikuti 30 orang warga binaan Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra (PPSDN) "Penganthi", salah satu UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Aktivitas pembinaan dibuka oleh Wakil Bupati (wabup) Temanggung, Irawan Prasetyadi, mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung. Wabup "nyentrik" dan merakyat ini menyambut dengan tangan terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan pembinaan disabilitas netra di wilayahnya. Disabilitas netra perlu memperoleh hak dan informasi geospasial yang sama sehingga wujud keadilan dan kehadiran negara terpenuhi, tandas wabup yang ternyata seorang geograf. Ujungnya, para disabilitas netra mempunyai kecerdasan spasial untuk mendukung aktivitas kegiatan lebih lanjut di masyarakat selepas lulus dari panti sosial.

Tim Teknis Atlas dan Pemetaan Sosial di bawah koordinasi Niendyawati, memberi materi pembinaan informasi geospasial dalam bentuk atlas taktual. Materi dimulai dari pengenalan wilayah NKRI dan perbatasan negara, pulau-pulau besar, hingga sebaran industri nasional di wilayah sampel. Semangat belajar disabilitas netra begitu kentara sehingga waktu selama 2 hari dirasakan masih kurang. Di akhir acara, para disabilitas netra mengaku memperoleh informasi yang berharga tentang NKRI. Tak dinyana, ternyata Pulau Sumatera sangat besar dan Malaysia ada dua bagian (Semenanjung Malaka dan Sarawak), demikian celetuk ringan dari salah satu peserta.

[Fakhruddin M dan Sugeng M, 2017]

Pembinaan Spasial terhadap Disabilitas Netra

BIG INTEGRASIKAN EMPAT KOMPONEN NERACA SUMBERDAYA ALAM

FGD Penyusunan NSPK Integrasi Neraca Sumberdaya Alam

Undang undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, pasal 24 menyebutkan bahwa BIG dapat mengintegrasikan lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru, dan IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru. Menindaklanjuti dari amanah tersebut, dilakukan kegiatan integrasi neraca. Maksud kegiatan ini adalah melakukan integrasi 4 (empat) neraca sumberdaya alam yakni lahan, hutan, mineral, dan air. Komponen sumberdaya alam tersebut sudah dikerjakan oleh wali data dari Kementerian/Lembaga terkait.

Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan NSPK Integrasi Neraca Sumberdaya Alam di Kota Yogyakarta. FGD ini dihadiri narasumber dan tim dari akademisi Universitas Gadjah Mada. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Mulyanto Darmawan mengharapkan integrasi neraca sumberdaya alam ini dapat memberikan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan evaluasi penataan ruang. Neraca tidak hanya dipandang sebagai besaran sumberdaya yang berubah namun bagaimana implementasi neraca dan integrasinya dalam pengambilan keputusan.

Beberapa hal menarik yang didiskusikan dalam integrasi ini adalah level dan kriteria kualitas data neraca sumberdaya yang dihasilkan. Walaupun sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penyusunan neraca namun masih banyak data neraca yang berbeda kualitas datanya. Oleh karena itu, standar data dan basis data sangat diperlukan dalam penyusunan neraca dan informasi geospasial lainnya. Hal tersebut sejalan dengan Kebijakan Satu Peta bahwa data harus mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

Pada tahap selanjutnya, akan dibahas mengenai metodologi integrasi yang akan digunakan. Metode yang akan digunakan adalah kombinasi dari *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Ruled Based System*. Data neraca sumberdaya alam yang tersedia akan disimulasikan untuk melihat model integrasi neraca yang dihasilkan.

FGD ditutup Kepala Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, Habib Subagio. Ada beberapa catatan mengenai model integrasi yang dihasilkan. Integrasi bukan sekedar melakukan tumpang susun data namun dapat memberikan *value added* data khususnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta evaluasi pemanfaatan ruang. **[Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2017]**

Uji Akurasi Neraca Sumberdaya Lahan Di Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

Kegiatan survei uji akurasi di Wilayah Sungai Serayu Bogowonto merupakan tahapan pekerjaan yang bertujuan untuk memvalidasi hasil neraca yang dibuat. Survei dilaksanakan pada 75 titik yang merupakan sampel untuk mewakili masing-masing kelas neraca sumberdaya lahan. Survei kali ini sedikit berbeda dengan survei sebelumnya karena tim perlu melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar guna memperoleh informasi terkait perubahan yang terjadi di titik sampel tersebut.

Tim survei terbagi menjadi tiga yang masing-masing memiliki jalur survei yang berbeda sehingga dapat menjangkau semua titik dengan lebih efektif dan efisien. Tim pertama memiliki jalur dimulai dari Kabupaten Purworejo menuju Kabupaten Kebumen dan titik akhirnya di Kabupaten Cilacap. Tim kedua memiliki jalur dari Kabupaten Cilacap melewati Kabupaten Purbalingga hingga Kabupaten Banyumas. Tim ketiga berangkat dari Kabupaten Wonosobo hingga ke Kabupaten Banjarnegara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

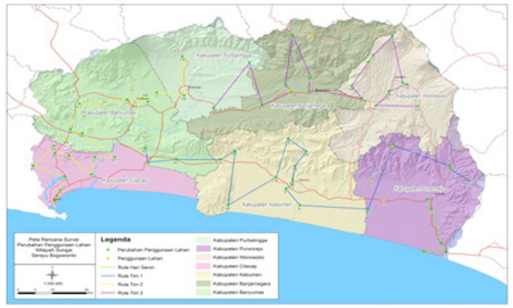

Dalam survei ini diketahui bahwa ada beberapa perubahan penutup lahan yang meragukan, contohnya sungai menjadi sawah yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Setelah melakukan wawancara dengan warga sekitar, diketahui bahwa daerah tersebut dulunya adalah badan sungai. Dikarenakan sungai tersebut surut serta mengalami penyempitan maka daerah tersebut dimanfaatkan menjadi sawah. Saat musim hujan, daerah tersebut tidak mengalami banjir karena sebelum dirubah menjadi sawah, daerah tersebut sudah ditinggikan terlebih dahulu oleh warga.

Contoh perubahan yang seperti itulah yang membuat survei ini perlu dilakukan secara mendalam sehingga dapat memvalidasi perubahan-perubahan yang awalnya diragukan. Hasil survei ini kemudian diolah untuk mengetahui tingkat akurasi dari pemetaan neraca sumberdaya lahan yang dilakukan di Wilayah Sungai Serayu Bogowonto. **[I Made Dipta, 2017]**

FGD II Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dengan RZWP3K

FGD dalam Rangka Integrasi Peta Tata Ruang dengan RZWP3K

Pada tanggal 23-24 November 2017, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melaksanakan FGD II Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau Kecil (RZWP3K). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG, Dr. Nurwadjedi. FGD ini merupakan lanjutan dari FGD I. Pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data yang selanjutnya dianalisa oleh tim teknis. Beberapa indikasi permasalahan ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk verifikasi.

FGD II ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda dari beberapa provinsi, yaitu Banten, Lampung, Jawa Tengah, serta Kalimantan Selatan. Tim teknis mendampingi selama pelaksanaan FGD sekaligus mengkonfirmasi tentang penyelarasan tata ruang darat dan laut. Masing-masing pemerintah daerah memberikan informasi serta verifikasi atas temuan permasalahan yang dihasilkan oleh tim teknis.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari K/L diantaranya Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP selaku Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Krishna Samudra, S.Pi., M.Si. Kepala Subdit Zonasi Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Nurul Istiqomah selaku Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Masing-masing narasumber memaparkan materi yang berkaitan dengan proses penyelarasan, penyerasian, dan penyeimbangan antara tata ruang darat dan laut. Tim narasumber menyampaikan bahwa RZWP3K harus selesai pada tahun 2018 sedangkan untuk tata ruang darat dalam hal ini RTRW Provinsi baru akan memasuki tahap revisi. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat menjadi panduan ataupun model penyelarasan, penyerasian tata ruang darat dan laut dalam rangka mendukung tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. **[Chintia Dewi, 2017]**

MEWARISKAN KOTA LAYAK HUNI

NEW RESENSI BUKU

Sebagai pengantar, penulis menyampaikan bahwa kota yang diharapkan di masa depan adalah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Buku ini dihadirkan sebagai refleksi pengalaman penulis dalam menyikapi pentingnya pemahaman publik terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara eksplisit mengakui pentingnya peran perkotaan. Kedepan, pembangunan berkelanjutan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan generasi yang akan datang, sehingga pembangunan kota masa depan harus berdasarkan pada pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup agar tercipta suatu bentuk perkotaan yang layak huni.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai identifikasi kecenderungan dalam tata kelola masa depan kota. Selanjutnya, disampaikan bahasan tentang perencanaan dan pengelolaan pembangunan kota yang berkelanjutan, kemitraan dalam pengembangan kota di masa depan, serta penyelarasan agenda pembangunan untuk menuju kota layak huni. Pada bagian akhir disampaikan pula bahasan mengenai penyusunan aksi bersama dalam mewujudkan kota berkelanjutan yang layak huni.

Beberapa hal yang telah disampaikan dalam buku ini dapat menggambarkan bahwa cara mewujudkan kota di masa depan yang layak huni dapat dilaksanakan dengan cara melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kota, baik secara horizontal maupun vertikal. Selain itu, diperlukan solusi teknis dalam perencanaan dan pembangunan kota tersebut, serta tentu saja adanya penyertaan manajemen lingkungan yang baik pula. **[Adinda Cempaka, 2017]**

Judul Buku : Mewariskan Kota Layak Huni
Penyusun : Nirwono Joga
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Halaman : xxix + 279 Hal
Tahun terbit : Februari 2017